

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERDAGANGAN**



**KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-IV pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan. Kinerja Dinas Perdagangan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendencygunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Perdagangan pada tahun-

tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangkalan, Maret 2023
**KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKALAN**

Drs. ROOSLI SOELIHARJONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP: 19631010 199311 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	3
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2022	12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	38
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
BAB IV PENUTUP	42
LAMPIRAN	44
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perdagangan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perdagangan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perdagangan.

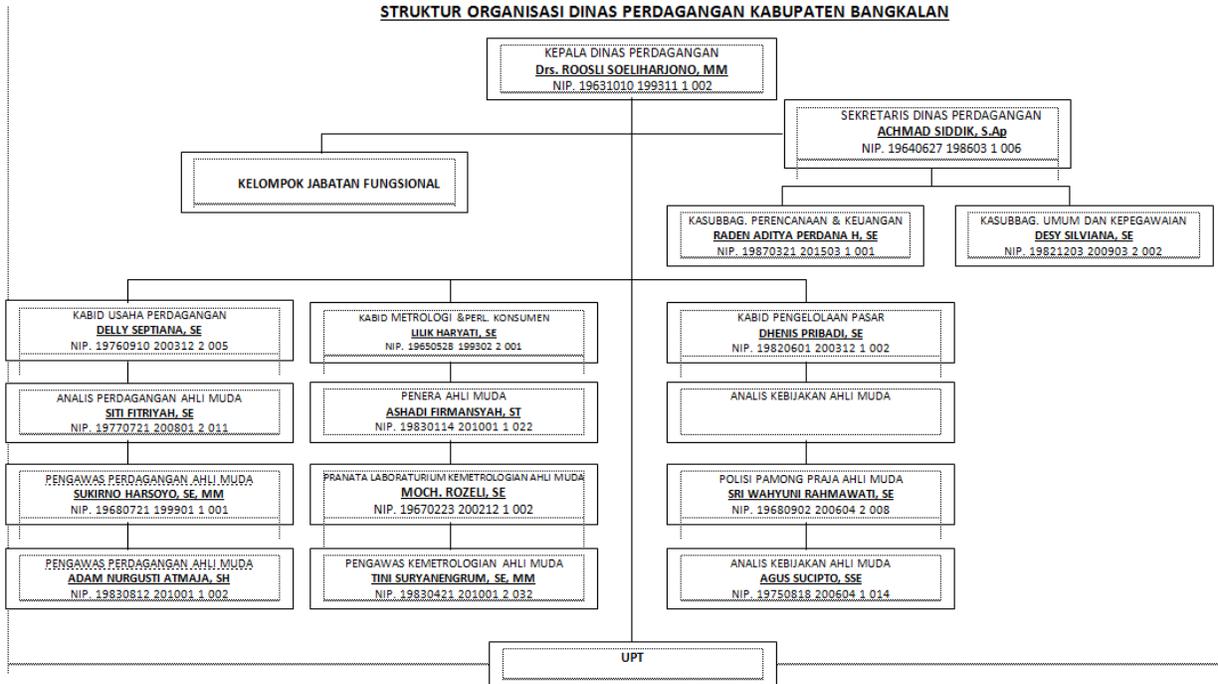
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah bidang perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah bidang perdagangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakkerja yaitu Kepala Dinas sebagai

pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Perdagangan.

Gambar 1.1.



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Perdagangan periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis di bidang Perdagangan Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang memadai bila dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan.
2. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku potensial unggulan daerah menuju terbentuknya produk unggulan untuk mengembangkan peran dunia usaha dan investasi
3. Panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan informasi pasar (akses pasar) baik dalam negeri maupun luar negeri
4. Pemberdayaan kepada eksportir, importir dan perizinan terhadap arus perdagangan dan peningkatan produk.
5. Pameran yang wajib diikuti, seperti Inacraft, TEI dan Pekan Raya Jakarta pameran-pameran lainnya
6. Penataan toko modern
7. Peningkatan informasi perdagangan
8. Peningkatan pelayanan kemetrolgian (tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dengan UPTD Metrologi Legal
9. Penataan Pasar Tradisional dengan melakukan rehabilitasi fisik dan non fisik.
10. Pemberdayaan Pedagang dengan penataan PKL didalam pasar.
11. Manajemen pengelolaan pasar bagi para Kepala Pasar.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra DINAS PERDAGANGAN periode 2018-2023, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis di bidang Perdagangan Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang memadai bila

- dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan
2. Pemberdayaan kepada eksportir, importer dan perizinan terhadap arus perdagangan dan peningkatan produk.
 3. Peningkatan informasi perdagangan
 4. Peningkatan pelayanan kemetrologian (tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dengan UPTD Metrologi Legal
 5. Penataan Pasar Tradisional dengan melakukan rehabilitasi fisik dan non fisik.
 6. Managemen pengelolaan pasar bagi para Kepala Pasar.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 76);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
6. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 47/E);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan Tahun 2022 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perdagangan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perdagangan. Rencana Strategis Dinas Perdagangan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perdagangan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perdagangan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Perdagangan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perdagangan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perdagangan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Perdagangan dimuat

program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah .

Visi Pemerintah Tahun 2018-2023 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL”

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Bangkalan sebagaimana dikemukakan diatas, Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan mengemban Misi ke 3 yaitu :

“Menyelenggarakan Pelayanan Dasar Berkualitas Dan Tata Kelola Pemanfaatan Potensi Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah”.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang

telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Tahun 2018-2023 sebanyak dua tujuan dan dua sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perdagangan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
DINAS PERDAGANGAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Produktivitas Perdagangan	1.2 MENINGKATKAN LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
1	Meningkatkan Produktivitas Perdagangan	1.2 MENINGKATKAN LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Nilai SKM Terhadap Layanan Pasar	80	80	81	82	83

2	Meningkatnya kinerja urusan bidang perdagangan	2.1	TERPENUHINYA PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	100	100	100	100	100
---	--	-----	--	--	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber : Renstra DINAS PERDAGANGAN periode 2018-2023

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
DINAS PERDAGANGAN

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat dan Daya Saing Sektor Perdagangan	2.1	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi	prosentase	Mengukur jumlah infrastruktur pasar rakyat yang diperbaiki dalam satu tahun anggaran	Jumlah Infrastruktur Pasar Rakyat Yang Diperbaiki : Jumlah Seluruh Infrastruktur Pasar Rakyat x 100%	DISDAG
2	Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat dan Daya Saing Sektor Perdagangan	2.2	Nilai SKM Terhadap Layanan Pasar	nilai	Mengukur nilai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan pasar	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Pasar	e-Sukma
1	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	1.1	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	indeks	Mengukur terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Rata-rata dari semua kegiatan kesekretariatan	DISDAG
2	Meningkatnya Kinerja Urusan Bidang Perdagangan	2.1	Persentase ketercapaian kinerja program urusan Bidang Perdagangan	prosentase	Mengukur tercapainya kinerja program urusan bidang perdagangan	Rata-rata dari semua kegiatan pada Urusan Bidang Perdagangan	DISDAG
1	Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat dan Daya Saing Sektor Perdagangan	1.1	Pertumbuhan PDRB kategori perdagangan	prosentase	Mengukur pertumbuhan PDRB kategori perdagangan	-	Statistik

Sumber : Indikator Kinerja Utama DINAS PERDAGANGAN Tahun 2022

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2022 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2022
DINAS PERDAGANGAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Produktivitas Perdagangan	1.2 MENINGKATNYA LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi	prosentase	6.9
1	Meningkatkan Produktivitas Perdagangan	1.2 MENINGKATNYA LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Nilai SKM Terhadap Layanan Pasar	nilai	83
2	Meningkatnya kinerja urusan bidang perdagangan	2.1 TERPENUHINYA PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	indeks	100

Sumber : Rencana Kerja DINAS PERDAGANGAN tahun 2022

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Perdagangan Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada bulan Januari tahun 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat dan Daya Saing Sektor Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi	6.9
2	Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat dan Daya Saing Sektor Perdagangan	Nilai SKM Terhadap Layanan Pasar	83
3	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	100
4	Meningkatnya Kinerja Urusan Bidang Perdagangan	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Bidang Perdagangan	100

5	Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat dan Daya Saing Sektor Perdagangan	Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan	3.15
---	---	---------------------------------------	------

Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS PERDAGANGAN Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Perdagangan :

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Tahun 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Yang Diperbaiki	6.9
2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Operasi Penertiban dan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pedagang di Pasar Yang Dilaksanakan	100 %
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluhan dan Pemberdayaan Konsumen	100 %
2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100 %

1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan yang Dilaksanakan	100 %
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Sarana Prasarana Pengelolaan Retribusi Pasar Yang Dilaksanakan	100 %
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100 %
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %

9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100 %
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar yang Diperbaiki	100 %
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 %
3	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pelayanan Tera / Tera Ulang Alat UTTP Dalam Rangka Perlindungan Konsumen	100 %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan	100 %
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang Direvitalisasi	3 Lokasi
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Pemeliharaan Pasar yang Dilaksanakan	3 Paket
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Operasi Penertiban dan Pembinaan Pedagang di Pasar Yang Dilaksanakan	14 Kali
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat	Jumlah Penyuluhan dan Pemberdayaan Konsumen	75 Orang

	Agen dan Pasar Rakyat		
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Harga Sembako di Pasaran	1 Paket
2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Data Harga Barang Penting di Pasaran	21 Lokasi
3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Harga Sembako Di Pasaran Pada Saat Menjelang Lebaran Dan Tahun Baru	6 Lokasi
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Laporan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	1 Dokumen
2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal yang Dilaksanakan	1 Dokumen
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	2 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Yang Disusun	2 Dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi	1 Dokumen

	SKPD	Kinerja SKPD Yang Disusun	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	8 Laporan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Yang Tersusun	24 Laporan
1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Yang Tersusun	2 Laporan
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26 Unit
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1 Unit
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Unit
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Jenis
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	2 Jenis

6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	15 Kali
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	2 Jenis
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 Jenis
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	12 Unit
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	47 Unit
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	1 Unit
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Relisasi Peraturan-Undangan	595 Orang

3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Disusun	1 Dokumen
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	8 Laporan
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1 Unit
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44 Unit
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Jenis
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	5 Jenis
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	2 Kali
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 Jenis

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS PERDAGANGAN Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perdagangan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perdagangan .

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil

pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perdagangan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perdagangan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perdagangan tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
DINAS PERDAGANGAN Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	TERPENUHINYA PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariat an	100	100	100	Sangat Tinggi	Disdag
2	MENINGKATNYA	Persentase	6.9	6.9	100	Sangat	Disdag

	LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi				Tinggi	
2	MENINGKATNYA LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Nilai SKM Terhadap Layanan Pasar	83	88,53	107	Sangat Tinggi	e-Sukma

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 2022		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
2	MENINGKATNYA LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	100
2	MENINGKATNYA LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Nilai SKM Terhadap Layanan Pasar	80	81	88,25	83	88,53	107
1	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	100	100	100	100	100	100
2	MENINGKATNYA KINERJA URUSAN BIDANG	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Bidang	100	100	100	100	100	100

	PERDAGANGAN	Perdagangan						
1	Meningkatkan Produktivitas Perdagangan	Pertumbuhan PDRB kategori perdagangan	6,81	-7,93	8.01	3.15	3.15	100

Dari tabel 3.3 dapat dijelaskan yaitu :

1. Pada sasaran strategis meningkatnya layanan daya saing sektor perdagangan menunjukkan pencapaian
 - indikator persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi capaian di tahun 2022 tercapai dengan baik yaitu tercapai 100% sesuai dengan target yang sudah ditetapkan yaitu 1 pasar yang diperbaiki untuk tahun 2022 dari total 29 pasar yang ada di Kabupaten Bangkalan
 - untuk indikator nilai SKM terhadap layanan pasar juga tercapai dengan baik yaitu mempunyai nilai 88,53 dari target nilai 83 hal ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan mendapat apresiasi yang bagus dari masyarakat, dan ada peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu mempunyai nilai 88,25
2. Pada sasaran Meningkatnya Kinerja Urusan Bidang Perdagangan menunjukkan pencapaian
 - Indikator Persentase ketercapaian kinerja program urusan Bidang Perdagangan yang dicapai pada tahun 2022 sebesar 100% sama dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DINAS PERDAGANGAN periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
2	MENINGKATNYA LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi	6.9	6.9	100
2	MENINGKATNYA LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Nilai SKM Terhadap Layanan Pasar	88,53	84	105
1	TERPENUHINYA PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	100	100	100
2	Meningkatnya kinerja urusan bidang perdagangan	Persentase ketercapaian kinerja program urusab Bidang Perdagangan	100	100	100
1	Meningkatkan Produktivitas Perdagangan	Pertumbuhan PDRB kategori perdagangan	3.15	3.15	100

Sebagaimana pada tabel 3.4, maka rata-rata tingkat kemajuan pencapaian indikator sasaran pada tahun 2022 terhadap sasaran akhir RENSTRA (2023) adalah 101%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/
Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
2	MENINGKATNYA LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi	6.9	-	100
2	MENINGKATNYA LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Nilai SKM Terhadap Layanan Pasar	83	-	100
1	TERPENUHINYA PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	100	-	100
2	Meningkatnya kinerja urusan bidang perdagangan	Persentase ketercapaian kinerja program urusab Bidang Perdagangan	100	-	100
1	Meningkatkan Produktivitas Perdagangan	Pertumbuhan PDRB kategori perdagangan	3.15	-	100

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
2	MENINGKATNYA LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi	6.9	6.9	100	Berhasil	-
2	MENINGKATNYA LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	Nilai SKM Terhadap Layanan Pasar	83	88,53	107	Berhasil	-
1	TERPENUHINYA PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	100	100	100	Berhasil	-
2	Meningkatnya kinerja urusan bidang perdagangan	Persentase ketercapaian kinerja program urusab Bidang Perdagangan	100	100	100	Berhasil	-
1	Meningkatkan Produktivitas Perdagangan	Pertumbuhan PDRB kategori perdagangan	3.15	3.15	100	Berhasil	-

Dari tabel 3.6 dapat disimpulkan bahwa setiap Sasaran Dinas Perdagangan pada tahun 2022 berhasil dilaksanakan dengan baik dan tercapai semua target yang sudah ditetapkan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat dan Daya Saing Sektor Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat yang Memiliki Infrastruktur yang Layak Fungsi	6.9	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Yang Diperbaiki	100	Menunjang
2				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Operasi Penertiban dan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pedagang di Pasar Yang Dilaksanakan	100	Menunjang
1		Nilai SKM Terhadap Layanan Pasar	83	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyuluhan dan Pemberdayaan Konsumen	100	Menunjang
2				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/K	Persentase Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	100	Menunjang

				ota	Tingkat Pasar Kabupaten /Kota		
1				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan yang Dilaksanakan	100	Menunjang
1	Terpenuhinya pelayanan Kesekretaria tan	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretaria tan	100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang
2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	99	Menunjang
4				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Sarana Prasarana Pengelolaan Retribusi Pasar Yang Dilaksanakan	99.64	Menunjang
5				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.55	Menunjang

6				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	99.07	Menunjang
7				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Yang Terlaksana	99.3	Menunjang
8				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100	Menunjang
9				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100	Menunjang
1				PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DISTRIBUSI PERDAGAN GAN	Jumlah Pasar yang Diperbaiki	10.6	Menunjang
2				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHA	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan	100	Menunjang

				N POKOK DAN BARANG PENTING	Pokok dan Barang Penting		
3				PROGRAM STANDARDI SASI DAN PERLINDUN GAN KONSUMEN	Persentase Pelayanan Tera / Tera Ulang Alat UTTP Dalam Rangka Perlindung an Konsumen	100	Menunjang
1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Terpenuhi nya Layanan Keseekretari atan	99	Menunjang
1				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang Direvitalisa si	33.33	Menunjang
2				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Pemelihara an Pasar yang Dilaksana kan	100	Menunjang
1				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Operasi Penertiban dan Pembinaan Pedagang di Pasar Yang Dilaksana kan	100	Menunjang
1				Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan	Jumlah Penyuluhan dan Pemberday aan	100	Menunjang

				Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Konsumen		
1				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Harga Sembako di Pasaran	100	Menunjang
2				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Data Harga Barang Penting di Pasaran	47.62	Menunjang
3				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Harga Sembako Di Pasaran Pada Saat Menjelang Lebaran Dan Tahun Baru	100	Menunjang
1				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Laporan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	100	Menunjang
2				Pengawasan/	Jumlah	100	Menunjang

				Penyuluhan Metrologi Legal	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal yang Dilaksanakan		
1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	100	Menunjang
2				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Yang Disusun	100	Menunjang
3				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Disusun	100	Menunjang
4				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	100	Menunjang
1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	100	Menunjang
2				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Yang	100	Menunjang

				steran SKPD	Tersusun		
1				Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Yang Tersusun	100	Menunjang
1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	Menunjang
2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100	Menunjang
3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	Menunjang
4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50	Menunjang
5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	40	Menunjang
6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-	100	Menunjang

					undangan		
7				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang
1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100	Menunjang
2				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Menunjang
1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	100	Menunjang
2				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	100	Menunjang
3				Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Gedung Kantor Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilita	100	Menunjang

				Lainnya	si		
1				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	100	Menunjang
1				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Relisasi Perundang-Undangan	100	Menunjang
3				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Disusun	100	Menunjang
4				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	100	Menunjang
2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100	Menunjang
3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	Menunjang
4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik	100	Menunjang

					Kantor		
5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	100	Menunjang
6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	100	Menunjang
7				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang
2				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Menunjang

Dari tabel 3.7 dapat disimpulkan bahwa setiap Program, Kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik dan menunjang kinerja Dinas Perdagangan pada tahun 2022, walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target pencapaian dikarenakan ada anggaran yang di rencanakan sebelumnya tidak terealisasi.

B. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	14.541.910.750	1.534.723.905	10.55
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	17.312.700	17.312.700	100
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	74.782.450	74.782.450	100
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.645.600	4.645.600	100
2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	6.754.750	6.754.750	100
2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	163.294.400	163.294.400	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.384.036.453	20.171.884.634	98.96
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	159.820.500	159.241.250	99.64
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.207.700	140.658.361	95.55
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.334.172.000	12.219.877.667	99.07
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.752.000	226.179.383	99.31
8	Pengadaan Barang Milik	3.300.000	3.300.000	100

	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	159.686.250	159.686.250	100
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	14.548.665.500	1.541.478.655	10.6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.420.620.503	33.085.473.095	99
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	180.607.100	180.607.100	100
3	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	74.782.450	74.782.450	100

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
2	MENINGKATNYA LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	6.9	6.9	100	14.804.055.050	1.796.868.205	12.14	87.86 %

2	MENINGKATNYA LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	83	83	100	14.804.055.050	1.796.868.205	12.14	87.86 %
1	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	100	100	100	33.420.620.503	33.085.473.095	99	1 %
2	MENINGKATNYA KINERJA URUSAN BIDANG PERDAGANGAN	100	100	100	33.420.620.503	33.085.473.095	99	1 %
1	Meningkatkan Produktivitas Perdagangan	3.15	3.15	100	14.804.055.050	1.796.868.205	12.14	87.86 %

Dari tabel 3.9 dapat dijelaskan untuk Sasaran Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat Dan Daya Saing Sektor Perdagangan sebesar Rp. 14.804.055.050,- dengan realisasi sebesar Rp.1.796.868.205,- atau terserap hanya 12.14%. dikarenakan ada salah satu sub kegiatan yang sumber danannya diDPA adalah dana pinjaman, dan pada sampai akhir tahun hal itu atau dana pinjaman tersebut tidak terealisasi/di ACC jadi hal ini yang membuat persentase untuk Sasaran Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat Dan Daya Saing Sektor Perdagangan hanya 12.14%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perdagangan Tahun 2022 Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perdagangan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Dinas Perdagangan menetapkan sebanyak 2 (dua) tujuan, 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatkan Produktifitas Perdagangan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)
- Tujuan Meningkatnya Kinerja Urusan Bidang Perdagangan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat dan Daya Saing Sektor Perdagangan terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PERDAGANGAN

Jl. Soekarno Hatta No. 15 Telp. (031) - 3095172 Bangkalan
Email : disdag@bangkalankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 188.45/ / kpts / 433.121 /2022
TENTANG
TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKALAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangkalan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penerapan SAKIP di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan;

b. bahwa pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

- Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan;
- b. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
- c. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu :
 1. Rencana Strategis;
 2. Perjanjian Kinerja;
 3. Pengukuran Kinerja;
 4. Pengelolaan Data Kinerja;
 5. Pelaporan Kinerja; dan
 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja;
- d. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
- e. Merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

KETIGA : Tim Penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan
pada tanggal : Januari 2022

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKALAN**
Drs. ROOSLI SOELIHARJONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631010 199311 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKALAN
 NOMOR : 188.45/ /Kpts/433.121/2022
 TANGGAL : JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA
 INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN
 KABUPATEN BANGKALAN

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung jawab	Drs. Roosli Soeliharjono, MM	Kepala Dinas Perdagangan
2.	Ketua	Achmad Siddik, SAP, MM.	Sekretaris Dinas Perdagangan
3.	Sekretaris	R. Aditya Perdana H, SE.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4.	Fasilitator :	Lilik Haryati, SE, MM. Delly Septiana, SE, MM. Dhenis Pribadi, SE.	Kabid Metrologi dan Perlindungan Konsumen Kabid Usaha Perdagangan Kabid Pengelolaan Pasar
5.	Anggota :	Desy Silviana, SE, MM. Sukirno Harsoyo, SE, MM. Agus Sucipto, SE. Moch Rozeli, SE. Sri Wahyuni R, SE, MM. Siti Fitriyah, SE, MM. Ashadi Firmansyah, ST. Tini Suryanengrum, SE, MM. Adam Nurgusti A, SH, MM. Fathur Rijal, Amd	Kasubag Umum dan Kepegawaian Pengawas Perdagangan Ahli Muda Analisis Kebijakan Ahli Muda Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda Polisi Pamong Praja Ahli Muda Analisis Perdagangan Ahli Muda Penera Ahli Muda Pengawas Kemetrologian Ahli Muda Pengawas Perdagangan Ahli Muda Staff Sekretariat


 KEPALA DINAS PERDAGANGAN
 KABUPATEN BANGKALAN
 Drs. ROOSLI SOELIHARJONO, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19631010 199311 1 002

Matriks Renstra
Kabupaten Bangkalan Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output) (Tahun 2020)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									2021		2022		2023					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Produktivitas Perdagangan	Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi	0.00.25	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Persentase terpenuhinya Pelayanan pasar		6,9%	-	6,9%	-	6,9%	2.799.098.300	13,80%	2.799.098.300	DINAS PERDAGANGAN	KAB. BANGKALAN
			0.00.25.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Penataan Bangunan Pasar		6,9%	-	6,9%	-	6,9%	2.799.098.300	13,80%	2.799.098.300		
					Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah pasar yang difasilitasi sarana distribusi perdagangan		3 lokasi	-	2 lokasi		2.799.098.300	6 lokasi	2.799.098.300			
			3.06.27	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Nilai SKM terhadap layanan pasar		82	5.008.000.000	83	-	84	4.094.455.900	84	9.102.455.900	DINAS PERDAGANGAN	KAB. BANGKALAN
			3.06.27.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Perentase sarana dan Prasarana pasar yang dibangun		10,34%	5.008.000.000	10,34%	-	10,34%	4.094.455.900	31,03%	9.102.455.900		
					Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah pasar yang direvitalisasi		3 lokasi	5.008.000.000	3 lokasi	-	3 lokasi	4.094.455.900	9 lokasi	9.102.455.900		
			3.06.23	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Persentase laporan pelanggaran terkait barang kena cukai yang terselesaikan		100%	-	100%	-	100%	208.022.800	100%	208.022.800	DINAS PERDAGANGAN	KAB. BANGKALAN
			3.06.23.06		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase lokasi pendataan produk rokok yang tidak dilekati pita cukai / ilegal		100%	-	100%	-	100%	208.022.800	100%	208.022.800		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pendataan produk rokok yang tidak dilekati pita cukai / ilegal		17 lokasi	-	17 lokasi	-	17 lokasi	208.022.800	51	208.022.800		
		3.06.26	PROGRAM PENGEMBA NGAN EKSPOR			Persentase pengembangan ekspor yang dilaksanakann		100 %	-	100 %	-	100 %	1.220.973.300,00	100	1.220.973.300,00	DINAS PERDAGANG AN	KAB. BANGKALAN
		3.06.26.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	-	100 %	-	100 %	1.220.973.300,00	100%	1.220.973.300,00		
				Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan			-	1 kali	-	1 kali	270.000.000	2 kali	270.000.000		
				Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		Jumlah pembinaan pelaku usaha ekspor yang dilaksanakan			-	1 kali	-	1 kali	160.000.000	2 kali	160.000.000		
				Pameran Dagang Nasional		Jumlah pameran dagang nasional yang diikuti		2 kali	-	1 kali	-	3 kali	586.328.000	6 kali	586.328.000		
				Pameran Dagang Lokal		Jumlah pameran dagang lokal yang diikuti			-	1 kali	-	1 kali	204.645.300	2 kali	204.645.300		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				PROGRAM PENGGUNA AN DAN PEMASARA N PRODUK DALAM NEGERI		Persentase program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri yang dilaksanakan				100%	-	100%	164.435.000	100%	164.435.000	DINAS PERDAGANGA N	KAB. BANGKALA N
				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				100%	-	100%	164.435.000,00	100%	164.435.000,00		
					Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah sistem jaringan informasi perdagangan yang dilaksanakan			-	1 paket	-	1 paket	110.000.000	2 paket	110.000.000		
					Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/K ota	Jumlah promosi Penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten yng diadakan			-	1 kali	-	1 kali	42.000.000	2 kali	42.000.000		
					Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/K ota	Jumlah kegiatan pembinaan pelaku usaha pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri ditingkat kabupaten/ kota yang diadakan			-	1 kali	-	1 kali	12.435.000	2 kali	12.435.000		
		3.06.26.03		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		100%	22.980.000	100%	189.716.700,00	100%	37.102.400	1	249.799.100	DINAS PERDAGANGA N	KAB. BANGKALA N

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		100 %	22.980.000	100 %	189.716.700,00	100 %	37.102.400	22 lokasi	249.799.100	1.880.803.900	
					Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah data harga sembako di pasaran		6 lokasi	22.980.000	1 laporan	25.505.000,00	9 lokasi	15.000.000	22 lokasi	63.485.000		
					Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah data harga barang penting di pasaran		6 lokasi	-	21 lokasi	15.296.600,00	9 lokasi	11.000.000	22 lokasi	26.296.600		
					Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah data harga sembako di pasaran pada saat menjelang lebaran, natal dan tanun baru		6 lokasi	-	6 lokasi	148.915.100,00	9 lokasi	11.102.400	22 lokasi	160.017.500		
	Nilai SKM terhadap layanan pasar	3.06.24.02	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Persentase pelayanan tera / tera ulang alat UTPP dalam rangka perlindungan konsumen		100 %	18.116.200	100 %	17.358.700	100 %	1.595.529.900		1.631.004.800		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyuluhan dan pemberdayaan konsumen yang dilaksanakan		100 %	18.116.200	100 %	17.358.700,00	100 %	29.717.500	210 orang	65.192.400		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah penyuluhan dan pemberdayaan konsumen		60 orang	18.116.200	75 orang	17.358.700,00	75 orang	29.717.500	210 orang	65.192.400		
		3.06.24.03			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase temuan yang ditindaklanjuti		100 %	-	100 %	-	100 %	20.505.100	215 pelaku usaha	20.505.100		
					Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti		65 pelaku usaha	-	70 pelaku usaha	-	80 pelaku usaha	20.505.100	215 pelaku usaha	20.505.100		
		3.06.24.04			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya alat-alat pendukung metrologi				1 paket	-	1 paket	1.545.307.300	2 paket	1.545.307.300		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah tersedianya alat-alat pendukung metrologi				1 paket	-	1 paket	1.545.307.300	2 paket	1.545.307.300		
		Nilai SKM terhadap layanan pasar	3.06.25	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Nilai SKM terhadap layanan pasar	82	1.122.815.900	83	14.659.975.000,00	84	2.199.688.500	1	17.982.479.400	DINAS PERDAGANGAN	KAB. BANGKALAN	
			3.06.25.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Presentase Sarana kebersihan dan pemeliharaan pasar yang dilaksanakan	1 paket	947.560.900	1 paket	14.485.577.500,00	1 paket	1.799.084.000	3 paket	17.232.222.400			
					Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang direvitalisasi			3 lokasi	13.721.975.000,00	29 lokasi	1.398.479.500	29 lokasi	15.120.454.500			
					Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana pemeliharaan pasar yang difasilitasi	1 Paket	947.560.900	3 jenis	763.602.500,00	3 jenis	400.604.500	6 jenis	2.111.767.900			
			3.06.25.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai SKM terhadap layanan pasar	82	166.595.000	83	166.153.750,00	84	318.131.000	3 paket	650.879.750	DINAS PERDAGANGAN	KAB. BANGKALAN	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Presentase sarana prasarana pengelolaan retribusi pasar yang dilaksanakan	100%	166.595.000	100%	166.153.750,00	100%	318.131.000	1	650.879.750			
				Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah yang tersusun	2 Laporan	166.595.000	2 lpaoran	166.153.750,00	2 lpaoran	318.131.000	6 laporan	650.879.750			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			3.06.25.03	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Presentase operasi penertiban & pelaksanaan pemutahiran data pedagang di pasar yang dilaksanakan		2 Paket	8.660.000	2 Paket	8.243.750,00	2 Paket	82.473.500	6 paket	99.377.250		
				Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah operasi penertiban & Pembinaan pedagang di pasar yang dilaksanakan		14 kali	8.660.000	14 kali	8.243.750,00	14 kali	60.000.000	42 kali	76.903.750		
				Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen pemutahiran data pedagang pasar yang dilaksanakan				1 dokumen	-	1 dokumen	22.473.500	2 dokumen	22.473.500		
	Nilai SKM terhadap layanan pasar		3.06.24	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pelayanan tera / tera ulang alat UTPP dalam rangka perlindungan konsumen		100	104.719.700	100	105.444.700,00	100	212.740.350	100	422.904.750	DINAS PERDAGANGAN	KAB. BANGKALAN
			3.06.24.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan	Persentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan yang dilaksanakan		100	104.719.700	100	105.444.700,00	100	212.740.350	6 dokumen	422.904.750		
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah sarana prasarana pengelolaan Kemetrolagian yang dilaksanakan		1 dokumen	96.703.050	1 dokumen	97.428.050,00	1 dokumen	195.740.350	3 dokumen	389.871.450		
				Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengawasan/ penyuluhan metrologi legal yang dilaksanakan		1 dokumen	8.016.650	1 dokumen	8.016.650,00	1 dokumen	17.000.000	3 dokumen	33.033.300		
	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan		0.06.16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100	32.176.463.538	100	33.141.159.244	100	34.946.501.839	100	100.264.124.621	DINAS PERDAGANGAN	KAB. BANGKALAN
			0.06.16.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	12.424.294.980	100 %	12.358.007.000	100 %	12.600.000.000	100	37.382.301.980		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3 jenis	542.400.000	2 jenis	541.400.000	3 jenis	600.000.000	9 jenis	1.683.800.000		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		6 jenis	11.881.894.980	7 jenis	11.816.607.000	6 jenis	12.000.000.000	18 jenis	35.698.501.980		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	71.817.100	100 %	155.467.200	100 %	316.676.500	100	543.960.800		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 unit	19.100.450	1 unit	19.122.400	1 unit	37.000.000	3 unit	75.222.850		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan		2 jenis	8.978.000	5 jenis	11.463.500	2 jenis	28.176.500	6 jenis	48.618.000		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 unit	1.004.650	26 unit	1.018.600	1 unit	2.500.000	3 unit	4.523.250		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				44 unit	1.014.200	1 jenis	3.000.000	2 jenis	4.014.200		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 jenis	3.840.000	1 jenis	4.860.000	1 jenis	6.000.000	3 jenis	14.700.000		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor		2 jenis	7.900.000	2 jenis	34.495.500	2 jenis	30.000.000	6 jenis	72.395.500		
		0.06.16.02			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD		5 kali	30.994.000	2 jenis	83.493.000	15 kali	210.000.000	35 kali	324.487.000		
		0.06.06.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun		100%	750.000	100%	1.250.000	100%	5.000.000	100	7.000.000		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun				1 laporan	-	1 laporan	2.500.000	2 laporan	2.500.000		
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 laporan	750.000	4 laporan	1.250.000	4 laporan	2.500.000	12 laporan	4.500.000		
		0.06.16.04			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		100 %	96.438.900	100 %	229.362.000	100 %	680.000.000	100	1.005.800.900		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		12 unit	81.398.900	12 unit	141.600.000	12 unit	300.000.000	36 unit	522.998.900		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 unit	60.302.000	1 unit	300.000.000	2 unit	360.302.000		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1 unit	-					1 unit	-		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		35 unit	15.040.000					35 unit	15.040.000		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				47 unit	27.460.000	35 unit	80.000.000	70 unit	107.460.000		
	0.06.16.05			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana					100%	3.300.000	100%	230.000.000	100	233.300.000		
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan				1 unit	-	1 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000		
					Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan				1 unit	-	1 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan				1 unit	3.300.000	5 unit	80.000.000	10 unit	83.300.000		
	0.06.16.06			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana			353.535.000	100%	171.985.400	100%	448.535.000	100	974.055.400			
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		-	-	114 buah	-	150 buah	75.000.000	264 buah	75.000.000		
	0.06.16.07				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2 orang	-	2 orang	20.000.000	4 orang	20.000.000		
					Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti relisasi perundang-undangan		35 orang	353.535.000	595 orang	171.985.400		353.535.000		879.055.400		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0.06.16.08		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	7.540.000	100%	6.250.000	100%	27.500.000	100	41.290.000		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun		1 dokumen	4.340.000	2 dokumen	1.250.000	1 dokumen	10.000.000	3 dokumen	15.590.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Dokumen RKA-SKPD yang disusun		1 dokumen	400.000	2 dokumen	-	1 dokumen	2.500.000	3 dokumen	2.900.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun				1 dokumen	-	1 dokumen	2.500.000	2 dokumen	2.500.000		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun		1 dokumen	400.000	2 dokumen	1.250.000	1 dokumen	2.500.000	3 dokumen	4.150.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun				1 dokumen	1.250.000	1 dokumen	2.500.000	2 dokumen	3.750.000		
			0.06.16.09		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		8 Dokumen	1.200.000	8 laporan	1.250.000	8 Dokumen	5.000.000	24 dokumen	7.450.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		1 dokumen	1.200.000	1 dokumen	1.250.000	1 dokumen	2.500.000	3 dokumen	4.950.000		
			0.06.16.10		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	19.222.087.558	100%	20.215.537.644	100%	20.618.790.339	100	60.056.415.541		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun		24 laporan	750.000	24 laporan	1.250.000	24 laporan	5.000.000	72 laporan	7.000.000		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 laporan	1.200.000	1 laporan	1.250.000	1 laporan	2.500.000	3 laporan	4.950.000		
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah	313 orang/bulan	19.220.137.558	12 bulan	20.213.037.644	12 bulan	20.611.290.339	12 bulan	60.044.465.541		
		0.06.16.11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar yang difasilitasi		-	1 kegiatan		1 kegiatan	20.000.000	2 kegiatan	20.000.000		
JUMLAH TOTAL									38.453.095.338		48.113.654.344		47.478.548.289		132.414.293.171		

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERDAGANGAN
TAHUN 2018 - 2023**



DINAS PERDAGANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PERDAGANGAN
Jl. Soekarno Hatta No. 15 Telp. (031) 3095172
B A N G K A L A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 050/ /433.121/2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKALAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor: Tahun . tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di

- Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan nomor 57 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perdagangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018 -2023

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perdagangan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan kegiatan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023

Pasal 2

Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja di lakukan oleh Sekretaris dan kepala Bagian sesuai Tugas Pokok dan Fungsi.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 2022

Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Bangkalan


Drs. ROOSLI SOELIHARJONO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631010 199311 1 002



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyusun dokumen Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023.

Dokumen Perubahan IKU inidisusun dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023 dengan mengacu pada Peraturan Meenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya dokumen Perubahan IKU, diharapkan kita dapat melkukan analisis dan evaluasi kinerja untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

Guna menjamin kelancaran dalam mengaplikasikan dokumen perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023, kami mengharap saran dan masukaan yang konstruktif dari berbagai pihak. Besar harapan kami, semoga dokumen perubahan IKU ini bermanfaat.

Bangkalan, 2022

Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Bangkalan



Drs. ROOSLI SOELIHARJONO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19631010 199311 1 002



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menilai tingkat kinerja suatu instansi pemerintah, diperlukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standart, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Namun permasalahan yang sering kita temui saat ini adalah adanya pergantian pimpinan pemerintahan yang diikuti oleh perubahan kebijakan yang tidak serasi lagi dengan kebijakan sebelumnya sehingga essensi rencana pencapaian target kinerja perlu disesuaikan kembali bentuk essensi-essensinya.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan “keys Performance Indicator“ di lingkungan instansi masing-masing.

Dengan ditetapkannya IKU diharapkan Instansi Pemerintah dapat melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

B. Pengertian



Pengertian dari Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategik organisasi.

Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator Kinerja Keluaran (Out put) dan hasil (outcome) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja utama pada tingkat Kementerian Negara/LPNK/ Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
2. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya;
3. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II Satuan Kerja / SKPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

C. TUJUAN

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



BAB II

PENETAPAN IKU

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal berikut yaitu :

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. Kebutuhan data statistik pemerintah;
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;



- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama diharapkan setiap pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat dianalisa dan dievaluasi dan pada akhirnya dapat digunakan untuk mengukur kinerja unit organisasi yang bersangkutan.



BAB III

P E N U T U P

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Keys Performance Indicator, harus memenuhi karakteristik spesifik, dapat dicapai, relevan dan dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.

Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan dalam menyusun IKU menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal. Dengan penetapan IKU diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan dimasa mendatang kearah yang lebih baik, efektif, efisien dan akuntabel.

Bangkalan, 2022

Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Bangkalan



Drs. ROOSLI SOELIHARJONO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19631010 199311 1 002

Lampiran : Keputusan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan
 Nomor : 188.45/ /KIK/433.121/2018
 Tanggal , Juli 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU)
 DINAS PERDAGANGAN 2018 – 2023**

VISI : Mewujudkan Bangkalan yang religious, sejahtera, dengan menggali potensi-potensi lokal

MISI : Mempercepat peningkatan perekonomian berbasis potensi lokal

TUJUAN : Meningkatnya ekonomi potensial daerah sektor perdagangan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	FORMULA	YG BER TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya layanan pasar rakyat	1. Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi	Untuk mengetahui Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi	$\frac{\text{Jumlah Infra struktur Pasar Rakyat yang diperbaiki}}{\text{Jumlah Seluruh Infrastruktur Pasar Rakyat}} \times 100\%$	Kasubbag. Perencana dan Keuangan
		2. Nilai SKM terhadap layanan pasar	Untuk mengetahui Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pasar	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Pasar	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen, pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ROOSLI SOELIHARJONO, MM.
Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKALAN
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : R. ABDUL LATIF AMIN IMRON
Jabatan : BUPATI BANGKALAN

Selaku pihak atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua, akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI BANGKALAN

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perdagangan

R. ABDUL LATIF AMIN IMRON

Drs. ROOSLI SOELIHARJONO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631010 199311 1 002

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi	6.9 %
		Nilai SKM terhadap layanan pasar	83

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp. 14.493.821.250	APBN, APBD
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 33.488.862.594	APBN, APBD
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp. 207.075.400	APBD
4	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp. 105.444.700	APBD

Pihak Kedua,
BUPATI BANGKALAN

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perdagangan

R. ABDUL LATIF AMIN IMRON

Drs. ROOSLI SOELIHARJONO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19631010 199311 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen, pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD TAUFIK, SE
Jabatan : Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. ROOSLI SOELIHARJONO, MM...
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan...

Selaku pihak atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua, akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Perdagangan

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Perdagangan

Drs. ROOSLI SOELIHARJONO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631010 199311 1 002

MOHAMMAD TAUFIK, SE
Pembina
NIP. 19640627 198603 1 006

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 32.969.173.844,-	APBD

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Perdagangan

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Perdagangan

Drs. ROOSLI SOELIHARJONO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631010 199311 1 002

MOHAMMAD TAUFIK, SE
Pembina
NIP. 19640627 198603 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen, pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. ADITYA PERDANA H, SE
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perdagangan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOHAMMAD TAUFIK, SE
Jabatan : Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan

Selaku pihak atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua, akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Perdagangan

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

MOHAMMAD TAUFIK, SE
Pembina
NIP. 19640627 198603 1 006

R. ADITYA PERDANA H, SE
Penata Muda TK. I
NIP. 19870321 201503 1 001

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	1 dokumen
		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen
		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen
		Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang disusun	1 dokumen
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1 dokumen
		Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Laporan
		Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran yang tersusun	24 laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 1.250.000,-
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 20.213.037.644,-
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.250.000,-
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 1.250.000,-

		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 1.250.000,-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 1.250.000,-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.250.000,-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 1.250.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Perdagangan

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

MOHAMMAD TAUFIK, SE
Pembina
NIP. 19640627 198603 1 006

R. ADITYA PERDANA H, SE
Penata Muda TK. I
NIP. 19870321 201503 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen, pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESY SILVIANA, SE
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOHAMMAD TAUFIK, SE
Jabatan : Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan

Selaku pihak atasan pihak pertama, **selanjutnya disebut PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua, akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Perdagangan

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

MOHAMMAD TAUFIK, SE
Pembina
NIP. 19640627 198603 1 006

DESY SILVIANA, SE, MM
Penata
NIP. 19821203 200903 2 002

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah laporan rekonsiliasi dan laporan barang milik daerah	4 laporan
		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 jenis
		Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 jenis
		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 jenis
		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 kali
		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 unit
		Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 jenis
		Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 unit
		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 jenis
		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 unit
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35 unit
		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Administ rasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 1.250.000,-

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 34.495.500,-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 11.463.500,-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 4.860.000,-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 83.493.000,-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 19.122.400,-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 1.014.200,-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 1.018.600,-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 11.816.607.000,-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 541.400.000,-
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 60.302.000,-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Rp. 141.600.000,-

	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 27.460.000,-
Kegiatan Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 3.300.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Perdagangan

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

MOHAMMAD TAUFIK, SE

Pembina
NIP. 19640627 198603 1 006

DESY SILVIANA, SE, MM

Penata
NIP. 19821203 200903 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen, pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DELLY SEPTIANA, SE
Jabatan : Kepala Bidang Usaha Perdagangan Dinas Perdagangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. ROOSLI SOELIHARJONO, MM
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan

Selaku pihak atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua, akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Perdagangan

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Usaha Perdagangan

Drs. ROOSLI SOELIHARJONO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19631010 199311 1 002

DELLY SEPTIANA, SE

Penata
NIP. 19760910 200312 2 005

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	Nilai ekspor perdagangan dalam negeri	Jumlah peserta yang mengikuti relisasi perundang-undangan	100 %
		Jumlah Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 353.535.000,-	DBHCHT
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp. 174.420.100,-	APBD

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Perdagangan

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Usaha Perdagangan

Drs. ROOSLI SOELIHARJONO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631010 199311 1 002

DELLY SEPTIANA, SE
Penata
NIP. 19760910 200312 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen, pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI FITRIYAH, SE
Jabatan Fung. : Analisis Perdagangan Ahli Muda Pada Dinas Perdagangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DELLY SEPTIANA, SE
Jabatan : Kepala Bidang Usaha Perdagangan Dinas Perdagangan

Selaku pihak atasan pihak pertama, **selanjutnya disebut pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua, akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Usaha Perdagangan

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Analisis Perdagangan Ahli Muda

DELLY SEPTIANA, SE
Penata
NIP. 19760910 200312 2 005

SITI FITRIYAH, SE
Penata
NIP. 19770721 200801 2 011

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	Nilai ekspor perdagangan dalam negeri	Jumlah data harga sembako di pasaran pada saat menjelang lebaran, natal dan tanun baru	9 lokasi
		Jumlah data harga sembako di pasaran	6 lokasi

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp. 148.915.100,-
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp. 25.505.000,-

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Usaha Perdagangan

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Analisis Perdagangan Ahli Muda

DELLY SEPTIANA, SE
Penata
NIP. 19760910 200312 2 005

SITI FITRIYAH, SE
Penata
NIP. 19770721 200801 2 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen, pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUKIRNO HARSOYO, SE, MM
Jabatan Fung. : Pengawas Perdagangan Ahli Muda Pada Dinas Perdagangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DELLY SEPTIANA, SE
Jabatan : Kepala Bidang Usaha Perdagangan Dinas Perdagangan

Selaku pihak atasan pihak pertama, **selanjutnya disebut pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua, akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Usaha Perdagangan

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Pengawas Perdagangan Ahli Muda

DELLY SEPTIANA, SE
Penata
NIP. 19760910 200312 2 005

SUKIRNO HARSOYO, SE, MM
Penata
NIP. 19680721 199901 1 001

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	Persentase laporan pelanggaran terkait barang kena cukai yang terselesaikan	Jumlah peserta yang mengikuti relisasi perundang-undangan	595 orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 353.535.000,-

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Usaha Perdagangan

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Pengawas Perdagangan Ahli Muda

DELLY SEPTIANA, SE
Penata
NIP. 19760910 200312 2 005

SUKIRNO HARSOYO, SE, MM
Penata
NIP. 19680721 199901 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen, pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADAM NURGUSTI ATMAJA, SH
Jabatan Fung. : Pengawas Perdagangan Ahli Muda Pada Dinas Perdagangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DELLY SEPTIANA, SE
Jabatan : Kepala Bidang Usaha Perdagangan Dinas Perdagangan

Selaku pihak atasan pihak pertama, **selanjutnya disebut pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua, akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Usaha Perdagangan

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Pengawas Perdagangan Ahli Muda

DELLY SEPTIANA, SE
Penata
NIP. 19760910 200312 2 005

ADAM NURGUSTI ATMAJA, SH
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19830812 201101 1 002

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	Nilai ekspor perdagangan dalam negeri	Jumlah pameran yang diikuti tingkat lokal maupun nasional	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Nasional	Rp 0,-

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Usaha Perdagangan

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Pengawas Perdagangan Ahli Muda

DELLY SEPTIANA, SE
Penata
NIP. 19760910 200312 2 005

ADAM NURGUSTI ATMAJA, SH
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19830812 201101 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen, pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LILIK HARYATI, SE
Jabatan : Kepala Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. ROOSLI SOELIHARJONO, MM.
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan

Selaku pihak atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua, akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Perdagangan

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Kabid Metrologi dan Perlindungan Konsumen

Drs. ROOSLI SOELIHARJONO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631010 199311 1 002

LILIK HARYATI, SE
Pembina
NIP. 19650627 198603 1 006

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	Persentase Jumlah UTTP yang di tera / tera ulang	Persentase pelayanan tera / tera ulang alat UTTP dalam rangka perlindungan konsumen	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp. 32.655.300,-	APBD
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp. 105.444.700,-	APBD

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Perdagangan

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Kabid Metrologi dan Perlindungan Konsumen

Drs. ROOSLI SOELIHARJONO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19631010 199311 1 002

LILIK HARYATI, SE

Pembina
NIP. 19650627 198603 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen, pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASHADI FIRMANSYAH, ST
Jabatan Fung. : Penera Ahli Muda Pada Dinas Perdagangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LILIK HARYATI, SE
Jabatan : Kepala Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan

Selaku pihak atasan pihak pertama, **selanjutnya disebut pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua, akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Metrologi dan
Perlindungan Konsumen

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Penera Ahli Muda

LILIK HARYATI, SE
Pembina
NIP. 19650627 198603 1 006

ASHADI FIRMANSYAH, ST
Penata
NIP. 19830114 201001 1 022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	Persentase Jumlah UTTP yang di tera / tera ulang	Jumlah sarana prasarana pengelolaan kemetrolgian yang dilaksanakan	1 dokumen
		Jumlah sarana prasarana pengelolaan kemetrolgian yang dilaksanakan	1 dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan	Pelaksanaan Metrologi legal berupa tera, tera ulang	Rp. 97.428.050,-
			Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Rp. 8.016.650,-

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Metrologi dan
Perlindungan Konsumen

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Penera Ahli Muda

LILIK HARYATI, SE
Pembina
NIP. 19650627 198603 1 006

ASHADI FIRMANSYAH, ST
Penata
NIP. 19830114 201001 1 022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen, pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCH. ROZELI, SE
Jabatan Fung. : Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Muda Pada Dinas Perdagangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LILIK HARYATI, SE
Jabatan : Kepala Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan

Selaku pihak atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua, akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Metrologi dan
Perlindungan Konsumen

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Muda

LILIK HARYATI, SE
Pembina
NIP. 19650627 198603 1 006

MOCH. ROZELI, SE
Penata
NIP. 19670223 200212 1 002

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	Persentase Jumlah UTTP yang di tera / tera ulang	Jumlah/persen temuan yang ditindaklanjuti	21 lokasi

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat pasar kabupaten/ kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Rp 15.296.600,-

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Metrologi dan
Perlindungan Konsumen

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Pranata Laboraturium Kemetrolgian Ahli Muda

LILIK HARYATI, SE
Pembina
NIP. 19650627 198603 1 006

MOCH. ROZELI, SE
Penata
NIP. 19670223 200212 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen, pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TINI SURYANENGRUM, SE, MM
Jabatan Fung. : Pengawas Kemetrologian Ahli Muda Pada Dinas Perdagangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LILIK HARYATI, SE
Jabatan : Kepala Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan

Selaku pihak atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua, akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Metrologi dan
Perlindungan Konsumen

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Pengawas Kemetrologian Ahli Muda

LILIK HARYATI, SE
Pembina
NIP. 19650627 198603 1 006

TINI SURYANENGRUM, SE, MM
Penata
NIP. 19830421 201001 2 032

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	Persentase Jumlah UTTP yang di tera / tera ulang	Jumlah / persen pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	75 orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp 17.358.700,-

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Metrologi dan
Perlindungan Konsumen

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Pengawas Kemetrologian Ahli Muda

LILIK HARYATI, SE
Pembina
NIP. 19650627 198603 1 006

TINI SURYANENGRUM, SE, MM
Penata
NIP. 19830421 201001 2 032



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen, pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CIPTANING TEKAT, S.KM, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. ROOSLI SOELIHARJONO, MM
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan

Selaku pihak atasan pihak pertama, **selanjutnya disebut pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua, akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Perdagangan

Bangkalan, Januari 2021
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengelolaan Pasar

Drs. ROOSLI SOELIHARJONO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631010 199311 1 002

CIPTANING TEKAT, S.KM, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19640210 198603 1 023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	Nilai SKM terhadap layanan pasar	Nilai SKM terhadap layanan pasar	83
2	Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi	Persentase pasar yang diperbaiki	0 %
		Persentase terpenuhinya pelayanan pasar	6.9 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 14.493.821.250,-	APBD
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 166.153.750,-	APBD

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Perdagangan

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengelolaan Pasar

Drs. ROOSLI SOELIHARJONO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19631010 199311 1 002

CIPTANING TEKAT, S.KM, MM

Pembina Tk. I
NIP. 19640210 198603 1 023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen, pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NASRUL FAUZI, S.IP
Jabatan Fung. : Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Perdagangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : CIPTANING TEKAT, S.KM, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan

Selaku pihak atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua, akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengelolaan Pasar

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda

CIPTANING TEKAT, S.KM, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19640210 198603 1 023

NASRUL FAUZI, S.IP
Penata
NIP. 19820720 201101 1 002

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	Nilai SKM terhadap layanan pasar	Jumlah laporan perencanaan pengelolaan retribusi daerah yang tersusun	2 laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp 166.153.750,-

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengelolaan Pasar

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda

CIPTANING TEKAT, S.KM, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19640210 198603 1 023

NASRUL FAUZI, S.IP
Penata
NIP. 19820720 201101 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen, pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI WAHYUNI RAHMAWATI, SE
Jabatan Fung. : Polisi Pamong Praja Ahli Muda Pada Dinas Perdagangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : CIPTANING TEKAT, S.KM, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan

Selaku pihak atasan pihak pertama, **selanjutnya disebut pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua, akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengelolaan Pasar

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Polisi Pamong Praja Ahli Muda

CIPTANING TEKAT, S.KM, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19640210 198603 1 023

SRI WAHYUNI RAHMAWATI, SE
Penata
NIP. 19680902 200604 2 008

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	Nilai SKM terhadap layanan pasar	Jumlah operasi penertiban dan pembinaan pedagang di pasar yang dilaksanakan	14 kali

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	Pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Rp 8.243.750,-

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengelolaan Pasar

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Polisi Pamong Praja Ahli Muda

CIPTANING TEKAT, S.KM, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19640210 198603 1 023

SRI WAHYUNI RAHMAWATI, SE
Penata
NIP. 19680902 200604 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen, pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SUCIPTO, SE
Jabatan Fung. : Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Perdagangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : CIPTANING TEKAT, S.KM, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan

Selaku pihak atasan pihak pertama, **selanjutnya disebut pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua, akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengelolaan Pasar

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda

CIPTANING TEKAT, S.KM, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19640210 198603 1 023

AGUS SUCIPTO, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19750818 200604 1 014

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	Nilai SKM terhadap layanan pasar	Jumlah pasar yang diperbaiki	2 lokasi
		Jumlah pasar yang direvitalisasi	3 lokasi
		Jumlah sarana kebersihan pasar yang dilaksanakan	29 lokasi

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 13.721.975.000,-
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 763.602.500,-

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengelolaan Pasar

Bangkalan, Januari 2022
Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda

CIPTANING TEKAT, S.KM, MM

Pembina Tk. I
NIP. 19640210 198603 1 023

AGUS SUCIPTO, SE

Penata Tingkat I
NIP. 19750818 200604 1 014

